

PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA TANGERANG SELATAN

Alda Nurhaliza Rizqia¹, Hartuti Purnaweni¹, ¹

¹Departemen Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jl. Prof. H. Soedarto, S.H Tembalang, Semarang Kotak Pos 1269

Email: nurhalizaalda@gmail.com

Abstrak: Aspek kesejahteraan bagi penyandang disabilitas telah diatur pada pasal 90 dalam UU No 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yang menyebutkan bahwa dalam mewujudkan kesejahteraan penyandang disabilitas negara perlu menjamin kesejahteraan sosial mereka, salah satunya dengan memberikan pemberdayaan sosial. Pemberdayaan penyandang disabilitas yang dilakukan dapat memberikan dampak positif. Pada pelaksanaan pemberdayaan realitanya belum memberikan hasil yang cukup baik, sehingga pemberdayaan yang diberikan belum memberikan dampak kesejahteraan yang nyata bagi penyandang disabilitas. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pelaksanaan program pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Tangerang Selatan serta menemukan faktor pengaruh keberhasilan dengan menggunakan teori kesesuaian David C. Korten. Penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif dan pengambilan informasi menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan yang diberikan telah memberikan manfaat bagi penyandang disabilitas tetapi sebagian pelatihan yang diberikan kurang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan sehingga kurang dapat memberikan hasil pemberdayaan. Oleh karena itu perlu ada pengembangan pemberdayaan pelatihan yang diberikan dan pemberdayaan pelatihan yang berfokus pada peningkatan kualitas diri penyandang disabilitas.

Kata kunci: Pelaksanaan, Pemberdayaan Masyarakat, Penyandang Disabilitas

PENDAHULUAN

World Report Disabillity yang dipublikasi oleh WHO (2011), menyebutkan bahwa penyandang disabilitas telah diklasifikasikan ke dalam model biopsikososial, yang berarti penyandang disabilitas dilihat berdasarkan masalah kondisi kesehatan yang dialami, seperti

kerusakan atau hilangnya salah satu bagian tubuh sehingga kondisi tersebut menghambat individu untuk melakukan aktivitas, dan menimbulkan masalah di kehidupan sosial mereka seperti sulitnya mengakses aspek penting kehidupan yang seharusnya dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat termasuk penyandang disabilitas.

Keberadaan penyandang disabilitas telah dilindungi oleh *United Nations Convention on the Right Person with Disabillities* (UN CRPD) yakni dalam menjamin hak-hak penyandang disabilitas secara intenasional yang bertujuan dalam memberikan kesamaan atas kesempatan, penghormatan, pemenuhan dan perlindungan atas hak penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial (Puspito, Nugraheni dan Purnaweni, 2019).

UN CRPD menghasilkan sebuah kesepakatan internasional mengenai hak penyandang disabilitas yang dicetuskan dalam *Convention on the Right of Person with Disabilities* (CRPD) yang telah ditandatangani dan diratifikasi oleh banyak negara dunia, termasuk juga Indonesia, diwujudkan dalam UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. ~~UU No 8 Tahun 2016 ini~~ menjadi acuan nasional dalam menjamin hak-hak penyandang disabilitas. Acuan tersebut penting untuk menjamin hak penyandang disabilitas di Indonesia yang sejumlah 31.242.233 jiwa untuk yang berumur diatas 2 tahun (Susenas 2018, dalam Hastuti, dkk, 2019).

Terdapat penyandang disabilitas yang dalam hidupnya mengalami diskriminasi sosial khususnya dalam mengakses pekerjaan dikarenakan penyandang disabilitas dianggap sebagai orang yang tidak sehat. (Purwandari, 2015), kemudian di Kota Semarang kuota minimal 1% penyandang disabilitas yang dipekerjakan di tiap perusahaan belum tercapai (Ratna dan Kismartini, 2018). Kondisi penyandang disabilitas yang terdiskriminasi tersebut dapat mendorong penyandang disabilitas dalam kondisi tidak berdaya dan terpinggirkan sehingga dapat menimbulkan ketidaksejahteraan bagi penyandang disabilitas. Padahal aspek kesejahteraan bagi penyandang disabilitas telah diatur pada pasal 90 dalam UU No 8 tahun 2016 disebutkan bahwa dalam

mewujudkan kesejahteraan penyandang disabilitas negara perlu menjamin kesejahteraan sosial penyandang disabilitas salah satunya yaitu dengan memberikan pemberdayaan sosial.

Kota Tangerang Selatan merupakan salah satu kota di wilayah Provinsi Banten yang memiliki jumlah penyandang disabilitas sebanyak 476 pada tahun 2020. Adanya kelompok penyandang disabilitas di Kota Tangerang Selatan maka pemerintah daerah Kota Tangerang Selatan perlu memberikan pelayanan pemberdayaan sosial kepada penyandang disabilitas selain untuk melaksanakan amanat dari UU No 8 Tahun 2016, serta juga untuk meningkatkan keberdayaan mereka sehingga tidak terpuruk dalam kondisi yang tidak berdaya dan dapat memberikan kesejahteraan bagi mereka.

Pemberdayaan telah dilakukan di berbagai kota di Indonesia termasuk pula di Kota Tangerang Selatan. Pada realitanya upaya pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Tangerang Selatan telah dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat tetapi belum menghasilkan hasil pemberdayaan yang cukup baik, seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Majid (2019), ditemukan bahwa pelaksanaan pemberdayaan masih mengalami kendala dalam aspek fisik, finansial, serta dukungan.

Penelitian pemberdayaan juga dilakukan oleh Rachmawati (2020), menemukan bahwa pemberdayaan kurang berhasil karena kurang percaya diri dan ketidaksesuaian kemauan dan keterampilan penyandang disabilitas. Kedua penelitian tersebut maka dapat terlihat bahwa pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Tangerang Selatan masih kurang memberikan kesejahteraan kepada mereka.

Fenomena adanya pemberdayaan yang dilakukan tetapi pada prosesnya kurang memberikan hasil yang baik tersebut menarik

untuk diteliti karena terdapat kendala yang menghambat tujuan pembedayaan. Oleh karena itu pada penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis pelaksanaan pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Tangerang Selatan beserta faktor pendukung dan penghambat yang berlangsung didalamnya.

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yang berarti memfokuskan pada permasalahan pada fenomena pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini mengambil lokus di Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan sebagai instansi yang menyelenggarakan pemberdayaan sosial kepada penyandang disabilitas di Kota Tangerang Selatan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan wawancara dan dokumentasi. Rentang waktu objek penelitian pada penelitian ini yaitu pemberdayaan penyandang disabilitas yang dilakukan pada rentang waktu 2019-2020.

Pada penelitian ini menggunakan subjek penelitian yang dipilih secara purposive. Subjek yang diteliti adalah pihak-pihak yang dapat memberikan informasi terkait topik penelitian. Maka dari itu mengambil subjek penelitian sebanyak 6 orang, yakni :

1. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, (**Informan 1**)
2. Staf Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas yang menjadi pelaksana program (**Informan 2**)
3. Staff Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas (**Informan 3**)
4. Anggota Yayasan Daksa Kreatif (**Informan 4**)
5. Pengurus Yayasan Himatra Sejahtera (**Informan 5**)

6. Kepala Sekolah Khusus Nurasih (**Informan 6**)

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Tangerang Selatan

Pemberdayaan penyandang disabilitas dilakukan dilakukan atas dasar UU No 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Pelaksanaan pemberdayaan penyandang disabilitas yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Tangerang selatan dilakukan dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan kepada penyandang disabilitas. Hal tersebut diungkap oleh Kepala Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Kota Tangerang Selatan:

“Kita mengadakan pelatihan peningkatan penginderaan bagi tuna netra, kemudian pelatihan ekonomi kreatif untuk daksa, kemudian juga peningkatan keterampilan bagi keluarga untuk grahita. Untuk latihan peningkatan penginderaan kita juga memberikan tongkat dari Kecamatan.” (Hasil wawancara tanggal 17 Februari 2021).

Terdapat 3 cara pelatihan yang diberikan yaitu pelatihan peningkatan penginderaan, pelatihan peningkatan keterampilan bagi keluarga dan penyandang disabilitas, dan pelatihan ekonomi kreatif.

1. Pelatihan Peningkatan Penginderaan

Pelatihan peningkatan penginderaan merupakan pelatihan peningkatan kemampuan penyandang disabilitas dalam memaksimalkan kemampuan sensorik yang mereka miliki kepada sasaran pelatihan yaitu penyandang disabilitas tuna netra. Pada pelaksanaan pelatihan peningkatan penginderaan, penyandang disabilitas tuna netra dilatih mengenai tata cara menggunakan transportasi umum kereta api seperti diajarkan cara membeli tiket,

melangkah naik ke kereta, menyebrang peron, hingga sampai penyandang disabilitas duduk dalam kereta serta penyandang disabilitas tuna netra juga dilatih cara menggunakan lift.

Pada pelaksanaan pelatihan peningkatan penginderaan Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan bekerjasama dengan Yayasan Himatra sebagai peserta pelatihan tersebut.

“Untuk pemberitahuan kegiatan pelatihan (peningkatan penginderaan) dari Dinsos kita dihubungi via telepon melalui wa. Kita dihubungi Dinsos karena memang kita lembaga yang aktif ke dinas sosial termasuk dalam mengikuti musrenbang dan lainnya. Untuk komunikasi karena Kita (Yayasan Himatra) termasuk lembaga resmi, kita berkomunikasi dahulu melalui undangan. Kemudian kita (Yayasan Himatra) sudah memiliki data orang-orang penyandang disabilitas. Kalaupun ada informasi pelatihan dari Dinsos kita sudah siap untuk data orang-orangnya yang akan diikuti pelatihan asal anggaran sesuai dan mereka dapat transport dan sebagainya kita siap.” (Hasil wawancara tanggal 23 Maret 2021)

Pemberian pelatihan diawali dengan melakukan sosialisasi informasi pelatihan peningkatan penginderaan oleh Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan yang diinformasikan melalui undangan yang ditujukan kepada Yayasan Himatra Sejahtera. Selanjutnya Yayasan Himatera Sejahtera telah memiliki data penyandang disabilitas tuna netra sehingga jika terdapat penawaran program pelatihan dari Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan, Yayasan Himatera Sejahtera dapat mempertimbangkan kesiapan dalam mengikuti program pelatihan yang ditawarkan.

Pada proses penyampaian materi pelatihan, terdapat metode tertentu dalam menyampaikan materi kepada penyandang disabilitas tuna netra. Hal tersebut dikarenakan penyandang disabilitas tuna netra membutuhkan perlakuan khusus dalam hal penyampaian materi sehingga dapat dipahami peserta pelatihan. Metode khusus yang digunakan misalnya dalam menyampaikan materi memberikan cara menggandeng, yang metodenya berbeda dengan cara menggandeng individu normal.

Pelaksanaan pemberdayaan penyandang disabilitas dalam hal pelatihan penginderaan dapat memberikan manfaat bagi penyandang disabilitas tuna netra, sebagaimana hasil wawancara dengan pengurus Yayasan Himatra Sejahtera berikut:

“Setiap pelatihan pasti ada manfaatnya. Pasti ada manfaatnya walaupun sesaat. Manfaat pelatihan mobilitas itu bisa untuk membuat kita dapat mandiri dan juga bisa digunakan seumur hidup. Tetapi sebelum ada pelatihan itu (pelatihan penginderaan) kita (Penyandang tuna netra) sudah biasa mandiri masing masing.” (Hasil wawancara tanggal 23 Maret 2021)

Adanya pelatihan penginderaan yang diberikan dapat bermanfaat bagi sasaran pelatihan yaitu bermanfaat dalam menambah pemahaman dan meningkatkan kemandirian penyandang disabilitas tuna netra yang sebelumnya memiliki rasa takut dalam melakukan mobilitas seperti menaiki eskalator dan menaiki lift, ataupun terdapat pengalaman pribadi yang buruk saat melakukan mobilitas. Selain itu juga memberikan kemandirian kepada penyandang disabilitas tuna netra. Disisi lain penyandang disabilitas tuna netra yang menjadi sasaran pelatihan telah memiliki kemandirian sebelum dilakukan pelatihan peningkatan pengindraan yang ditawarkan oleh Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan.

2. Pelatihan Peningkatan Keterampilan Bagi Keluarga Dan Penyandang Disabilitas Intelektual

Pada pelatihan peningkatan keterampilan keluarga dan penyandang disabilitas intelektual Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan dilakukan dengan memberikan pelatihan angklung kepada penyandang disabilitas intelektual. Pelatihan keterampilan angklung ditawarkan oleh Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan Kepada SKH Nurasih untuk berpartisipasi sebagai peserta pelatihan.

Pada pelaksanaan pelatihan angklung diawali dengan sosialisasi informasi pelatihan angklung oleh Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan yang diinformasikan kepada Sekolah Khusus (SKH) Nurasih. Selanjutnya Sekolah Khusus (SKH) Nurasih meneruskan informasi pelatihan kepada orang tua penyandang disabilitas kemudian melakukan pendataan peserta yang berminat mengikuti pelatihan dan kemudian diajukan kepada Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan.

Pada pelaksanaan pelatihan keterampilan angklung penyandang disabilitas intelektual diberikan materi mengenai cara memainkan lagu dengan menggunakan alat musik angklung. Pemberian materi kepada penyandang disabilitas intelektual memiliki metode tertentu seperti terdapat pembagian baris yang tiap barisnya memiliki nada angklung yang berbeda kemudian diberi arahan berupa kode angka agar penyandang disabilitas yang berada di baris yang disebutkan dapat membunyikan alat musik angklung.

Pada pemberian pelatihan angklung kepada disabilitas anak intelektual ini dapat memberikan beberapa manfaat bagi mereka seperti yang disebutkan oleh Kepala SKH Nurasih:

“Kebetulan disini kan kita juga ada pembelajaran keterampilan seni musik,

jadi yang membentuk anak-anak jadi lebih variasi. Selama ini kalau misalnya (pembelajaran) musik cuma pake organ. Selain itu juga pelatihan angklung untuk disabilitas grahita itu sendiri dapat melatih gerak motorik tangan. Disamping itu juga memupuk kerja sama antar teman-temannya kan satu tim gitu. Kemudian sebagai pengenalan angklung secara langsung juga (bermanfaat) untuk pengembangan musik tradisional. Jadi anak-anak juga tahu angklung mulai dari bentuk angklung dan cara mainnya seperti ini. Kemudian mereka juga bahagia karena dapat tau lagu-lagu yang bisa dimainkan dengan angklung.” (Hasil wawancara tanggal 31 Maret 2021)

Pelatihan ini memberikan manfaat dalam hal mengembangkan aspek kognitif berupa transfer pengetahuan permainan alat musik angklung, aspek psikomotorik berupa gerak tangan yang dilibatkan saat pelatihan, dan aspek afektif berupa sikap seperti terjalinnya kerjasama antara individu penyandang disabilitas intelektual. Pada penelitian ini juga terdapat manfaat dalam hal budaya untuk melestarikan alat musik angklung.

3. Pelatihan Ekonomi Kreatif

Pemberdayaan penyandang disabilitas oleh Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan salah satunya dilakukan dengan memberi pelatihan ekonomi kreatif melalui pelatihan budidaya lele kepada penyandang disabilitas fisik yang ada di Kota Tangerang Selatan. Pemberian pelatihan budidaya lele yang dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi ketergantungan penyandang disabilitas fisik dengan orang lain dan juga agar dapat berusaha secara mandiri.

Wawancara dengan informan 2 disebutkan bahwa pada awal proses pelatihan diawali dari penyebarannya informasi kegiatan yang dilakukan dengan:

“kegiatan (Pelatihan ekonomi kreatif) ke disabilitas daksa itu kan untuk disabilitas fisik yang ada di (wilayah) Tangsel. Biasanya juga ada komunitas disabilitas fisiknya sendiri. Jadi kita penyebaran informasi kegiatan pelatihan tersebut dengan mengirimkan surat ke yayasan dan terkadang ke kelurahan. Kalau disabilitas daksa itu biasanya ada komunitasnya jadi kita tinggal membagikan informasi kesitu (komunitas daksa) dan misal disabilitas daksa itu belum masuk ke organisasi maka bisa diajak oleh teman yang dikenalnya.” (Hasil Wawancara Tanggal 17 Februari 2021)

Pelaksanaan pelatihan ekonomi kreatif melalui budidaya lele diawali dengan sosialisasi informasi pelatihan budidaya lele oleh Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan yang diinformasikan kepada organisasi dan yayasan penyandang disabilitas fisik untuk berpartisipasi sebagai peserta pelatihan. Selanjutnya informasi pelatihan dapat terhubung kepada individu-individu penyandang disabilitas fisik.

Pada proses pelatihan budidaya lele, penyandang disabilitas diberi keterampilan mengenai seluk beluk budidaya lele seperti, diberi pengetahuan mengenai cara membudidayakan lele, membersihkan kolam, dan pemberian pakan. Penyandang disabilitas yang mengikuti pelatihan juga diberi buku panduan tata cara budidaya lele sebagai panduan mereka untuk memudahkan melakukan budidaya. Ekonomi kreatif dengan budidaya lele dapat memberikan manfaat bagi penyandang disabilitas yang mengikuti pelatihan yaitu sebagaimana wawancara dengan Informan 4:

“Program pelatihan yang diberikan kepada disabilitas tentunya ya, sangat bermanfaat untuk kesejahteraan disabilitas itu sendiri. Diantaranya kemarin sempat diadakan pelatihan tuna

daksa atau pelatihan yang lain juga..” (Hasil Wawancara Tanggal 9 Maret 2021)

Manfaat adanya pelatihan budidaya lele yaitu dapat memberikan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas fisik dan dapat menambah keterampilan dalam hal budidaya lele.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Tangerang Selatan

1. Kesesuaian Program Dengan Organisasi Pelaksana

Dalam kegiatan pelaksanaan program pemberdayaan penyandang disabilitas oleh Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan telah tersedia anggaran yang mencukupi untuk melaksanakan program. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas:

“(Dana pelatihan berasal dari) APBD. Ada juga bantuan dari organisasi juga itu berupa bantuan pemberian kaki palsu dari Yayasan Peduli Tuna Daksa.” (Hasil Wawancara Tanggal 17 Februari 2021)

Pada program pemberdayaan penyandang disabilitas yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan telah memiliki dukungan anggaran yang diperlukan. Dukungan anggaran tersebut bersumber dari APBD Kota Tangerang Selatan dan bantuan anggaran dari Provinsi Banten dan pihak swasta seperti Wiyataguna dan Yayasan Peduli Tuna daksa.

Pemberdayaan penyandang disabilitas memiliki dukungan dalam hal sumber daya, yaitu program pemberdayaan penyandang disabilitas dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan dengan bekerjasama dengan pihak swasta. Seperti wawancara yang dilakukan dengan Kepala Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas:

“Untuk tiap pelatihan kita (Dinsos) mengundang narasumber dari luar. Jadi saat pelatihan yang mengajari penyandang disabilitas itu narasumber dari luar yang ahli di bidangnya masing-masing. Kemarin kita ada narasumber dari rumah Kak Seto, ada dari Balai yang dari Bekasi, ada juga dari masyarakat perikanan itu dari satuan pengelolaan perikanan darat.” (Hasil Wawancara Tanggal 17 Februari 2021)

Melihat hal tersebut maka pada pemberian pemberdayaan penyandang disabilitas yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan telah memiliki dukungan sumberdaya dengan melakukan kerjasama dengan pihak swasta untuk menjadi narasumber luar instansi Dinas Sosial yang ahli dalam bidang tertentu untuk memberikan pelatihan kepada penyandang disabilitas. Kerjasama tersebut dilakukan dengan berbagai instansi seperti dari Rumah Kak Seto, balai-balai pelatihan, dan Satuan Pengelolaan Perikanan Darat.

Pada pelaksanaan program pemberdayaan juga telah terdapat komunikasi secara horizontal dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan. Komunikasi horizontal tersebut dilakukan pada saat proses penyebaran informasi pemberdayaan pelatihan yakni dengan berkomunikasi dengan berbagai komunitas dan yayasan penyandang disabilitas. Penyebaran informasi yakni dilakukan dengan mengkomunikasikan informasi pemberdayaan pelatihan kepada individu penyandang disabilitas kepada Yayasan Himatra Sejahtera untuk pelatihan peningkatan penginderaan, dan SKH Nurasih untuk pelatihan keterampilan angklung, dan komunitas disabilitas fisik yang ada di Tangerang Selatan untuk pelatihan ekonomi kreatif budidaya lele.

2. Kesesuaian Program Dengan Pemanfaat

Pada program pemberdayaan penyandang disabilitas dalam hal pemberian pelatihan budidaya lele telah terdapat kesesuaian antara program dengan kebutuhan penyandang disabilitas fisik. Hal tersebut disebutkan oleh Informan 4 yaitu:

“Kita pernah memberikan usulan kita ya. Jadi program program pelatihan untuk penyandang disabilitas, kan punya kesulitan dan kelebihan masing masing kan yang harus digali dalam arti kemampuan yang non difabelnya ada kan. Dari situlah kita mengadakan usulan untuk melakukan pelatihan-pelatihan dengan Dinas Sosial Tangsel. Diantaranya kemarin kita mengajukan ternak lele. Kalau untuk non spesifikya ada kraft, ada pelatihan produksi, memasang barang produk produk disabilitas, terus ada makanan snack atau apa, kan ada beberapa UKM untuk disabilitas di Tangsel.” (Hasil Wawancara Tanggal 9 Maret 2021)

Berdasarkan ungkapan tersebut maka telah ada keterlibatan organisasi penyandang disabilitas fisik dalam memberikan usulan pelatihan. Usulan pelatihan tersebut merupakan bukti telah sesuaiya pelatihan budidaya yang ditawarkan oleh Dinas Sosial dengan kebutuhan penyandang disabilitas.

Pada program pemberdayaan penyandang disabilitas dalam hal pemberian pelatihan penginderaan yang diberikan kurang terdapat kesesuaian antara program dengan kebutuhan penyandang disabilitas tuna netra. Hal tersebut sesuai dengan wawancara dengan pengurus Yayasan Himatra:

“Pelatihan mobilitas tersebut memang kebutuhan teman-teman tuna netra. Tetapi sebenarnya kurang sesuai, karena kalau mobilitas mobilitas itu teman-teman tuna netra yang disini (Himatra) sudah pernah mengenyam pendidikan dari SD sampai ke

tingkatan formal sudah dilatih kemandirian dari situ. Jadi setelah selesai pendidikan kita sudah bisa mandiri sendiri.” (Hasil wawancara tanggal 23 Maret 2021)

Pelatihan peningkatan penginderaan dalam pelaksanaannya menemui temuan yaitu sasaran pelatihan penginderaan telah memiliki kemandirian mobilitas sebelum adanya tawarkan pelatihan penginderaan oleh Dinas Sosial Kota Tangerang. Adanya hal tersebut maka pemberdayaan penyandang disabilitas yang ditawarkan belum memiliki kesesuaian kebutuhan dengan pemanfaat program.

Pada program pemberdayaan penyandang disabilitas dalam hal pemberian pelatihan angklung yang ditawarkan kepada penyandang disabilitas intelektual di SKH Nurasih telah memiliki kesesuaian antara program dengan kebutuhan. Seperti wawancara dengan kepala SKH Nurasih:

“Kebetulan disini kan kita juga ada pembelajaran keterampilan seni musik, jadi yang membentuk anak-anak jadi lebih variasi. Selama ini kita kalo misalnya (pembelajaran) musik cuma pake organ. Kalau manfaat pelatihan angklung untuk disabilitas grahita itu sendiri dapat melatih gerak motorik tangan. Di samping itu juga memupuk kerja sama antar teman-temannya kan satu tim gitu. Kemudian sebagai pengenalan angklung secara langsung juga (bermanfaat) untuk pengembangan musik tradisional. Jadi anak-anak juga tahu angklung mulai dari bentuk angklung dan cara mainnya seperti ini. Kemudian mereka juga bahagia karena dapat tau lagu-lagu yang bisa dimainkan dengan angklung.” (Hasil wawancara tanggal 31 Maret 2021)

Terlihat bahwa pelatihan angklung telah sesuai jika dilihat dari kebutuhan di SKH Nurasih yaitu memang memiliki

pembelajaran keterampilan seni musik bagi anak penyandang disabilitas intelektual, dengan diberikannya pelatihan angklung juga memberikan hasil manfaat bagi anak penyandang disabilitas yaitu dalam hal menambah variasi pemahaman alat musik, meningkatkan kerjasama, melatih kebersamaan dan meningkatkan motorik gerak tangan anak penyandang disabilitas intelektual, serta dapat mengembangkan alat musik tradisional.

3. Kesesuaian Organisasi pelaksana dengan Pemanfaat

Pada pemberian pelatihan budidaya lele dalam pelaksanaannya penyandang disabilitas fisik memiliki kesulitan untuk melakukan hasil manfaat pelatihan setelah dilakukannya pelatihan. Sebagaimana wawancara dengan Informan 4:

“Kalau untuk ternak lele kan itu jadi harus dilihat dari disabilitas. Karena ga semua bisa mampu ya. Karena kan ada beberapa yang tidak punya lahan sendiri ataupun lahan terbatas ya. Jadi ada media media untuk ternak lele seperti dibikin bukan seperti keramba tetapi lebih seperti pakai terpal. Karena memang lahan yang dibutuhkan untuk ternak lele cukup luas. Kedua juga pengaruh di akses, kita (disabilitas daksa) kurang mungkin ternak lele dengan menggunakan kursi roda.” (Hasil Wawancara Tanggal 9 Maret 2021)

Pada pemberian pelatihan angklung kepada penyandang disabilitas fisik ditemukan bahwa tidak semua penyandang disabilitas fisik mampu melaksanakan hasil program dikarenakan keterbatasan sarana tempat yang diperlukan seperti media lahan untuk melakukan budidaya dan juga memiliki keterbatasan akses yang dimiliki sehingga tidak semua mampu melaksanakan hasil manfaat dari pelatihan budidaya lele tersebut.

Pada pelaksanaan program pemberdayaan penyandang disabilitas dalam hal pelatihan penginderaan yang diikuti oleh penyandang disabilitas tuna netra juga menemukan bahwa pelatihan yang diberikan belum dapat dipergunakan oleh sasaran pelatihan.

“Menurut saya karena seharusnya supaya lebih matang Dinas Sosial yang menganggarkan, kita (Himatra) yang memprogramkan. Karena yayasan lebih paham apa yang dibutuhkan oleh teman-teman kita (anggota himatra). Kalau misal sudah turun kayak bantuan tongkat. Kita setiap hari sudah punya tongkat. Buat apa dibantu tongkat lagi. Kebutuhan kita tidak hanya tongkat. Ada kebutuhan yang yang kita butuh. Dan untuk mobilitas tidak hanya tongkat yang dibutuhkan. Harapan kita seperti itu, tetapi kita tidak dilibatkan dalam rapat dinas sosial, hanya ditunjuk untuk menjalankan proyek ini (pelatihan mobilitas).” (Hasil Wawancara Tanggal 23 Maret 2021)

Dapat terlihat bahwa pelatihan yang dilakukan dengan hanya menawarkan program pemberdayaan tersebut kepada penyandang disabilitas tuna netra dan hanya ditunjuk sebagai objek kegiatan pemberdayaan saja dan tidak diikutsertakan dalam proses perencanaan sehingga program pemberdayaan penyandang disabilitas yang ditawarkan kurang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas tuna netra.

Pada pelaksanaan program pemberdayaan penyandang disabilitas dalam hal pelatihan angklung juga manfaat secara nyata belum dapat dirasakan

“Sebenarnya kalo untuk tuna grahita, kalo tuna grahita itu ga bisa pelatihan cuma sekali. Harus dilakukan pelatihan secara kontinyu misalnya untuk tiap bulan diadakan pelatihan. Kalo pelatihan

ini (pelatihan angklung) kemaren itu pelatihan cuma selama satu minggu saja. Setelah itu ya sudah tidak berlanjut lagi. Kemudian pelatihan angklung dari SKH Nurasih juga kebetulan guru-guru kita kurang kurang menguasai angklung. Jadi begitu pelatihan jarang kita mainkan lagi.” (Hasil wawancara tanggal 31 Maret 2021)

Dapat terlihat bahwa pelatihan angklung yang dilakukan hanya berlangsung selama satu minggu. Hal tersebut kurang maksimal karena untuk penyandang disabilitas intelektual perlu dilakukan secara berkala dan berkelanjutan. Ditambah dengan sumber daya SKH Nurasih yang kurang menguasai permainan alat musik tersebut sehingga setelah dilakukan program pemberdayaan hasil manfaat program tidak dapat dipergunakan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan program pemberdayaan penyandang disabilitas dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan kepada penyandang disabilitas seperti pelatihan peningkatan penginderaan, pelatihan peningkatan keterampilan bagi keluarga dan penyandang disabilitas, dan pelatihan ekonomi kreatif. Tiap pelatihan yang diberikan dapat bermanfaat bagi penyandang disabilitas
2. Pada pelaksanaan program pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Tangerang Selatan telah didukung oleh kemampuan organisasi pelaksana untuk menjalankan program pemberdayaan penyandang disabilitas, terdapat kesesuaian antara program dengan pemanfaat untuk pemberian pelatihan peningkatan keterampilan bagi

keluarga dan penyandang disabilitas intelektual dan pelatihan budidaya lele, sedangkan untuk pelatihan peningkatan penginderaan kurang terdapat kesesuaian antara program dengan pemanfaat, serta pemberdayaan yang dilakukan mengalami hambatan dalam hal kurang ada kesesuaian antara organisasi pelaksana dengan pemanfaat

B. Saran

1. Perlu dilakukan pelaksanaan pemberdayaan yang berfokus pada peningkatan kualitas diri penyandang disabilitas daripada pemberdayaan yang hanya berfungsi untuk mengembalikan fungsi kondisi tubuh.

2. Perlu mengembangkan pemberdayaan pelatihan yang diberikan agar manfaat pelatihan semakin dirasakan oleh sasaran program, seperti pada pelatihan penginderaan perlu dikembangkan pelatihan kemandirian yang belum pernah dimiliki oleh sasaran program. Pada pelatihan angklung perlu dilakukan pemberdayaan kepada SDM SKH Nurasih agar pelatihan dapat berkelanjutan. Kemudian pada pelatihan budidaya lele perlu mewadahi sarana dan prasarana serta akses pasar untuk mendorong keberhasilan dan keberlanjutan usaha budidaya penyandang disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadi, A. P. (2010). Konsep Pemberdayaan, Partisipasi Dan Kelembagaan Dalam Pembangunan. Yayasan Agribisnis/Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarta (PPMA).
- Hastuti, dkk. (2019). Kendala Mewujudkan Pembangunan Eksklusif terhadap Penyandang disabilitas. The SMERU Research Institute
- Imronah. (2011). Implementasi Kebijakan : Perspektif , Model Dan Kriteria Pengukurannya. Gema Ekosos, 6(2), 1098–1118.
- Maftuhin, A. (2016). Mengikat Makna Diskriminasi : Penyandang Cacat, Difabel, Dan Penyandang Disabilitas. *Inklusi: Journal Of Disability Studies*, 3(2), 139–162. <https://doi.org/10.14421/ijds.030201>
- Majid, N. (2019). Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Melalui Program Kewirausahaan Budidaya Burung Puyuh (Studi di Yayasan Difabel Mandiri Indonesia). Thesis. UIN SMH Banten.
- Purwandari, E. (2015). Pemberdayaan Difabel Daksa Oleh Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (Brptd) Studi Di Dusun Piring Desa Srihandono Kecamatan Pundong Kabupaten Bantul Diy.
- Puspito, Heri, Sri Achadi Nugraheni, Hartuti Purnaweni, Faktor penghambat pemenuhan hak kesehatan reproduksi penyandang disabilitas (studi pada remaja SMP di SLB negeri Bantul Yogyakarta). (2019). *Visikes*. 175-189
- Rachmawati, S. & Muhtadi. (2020). Strategi Pemberdayaan Soft Skills Penyandang Disabilitas di Deaf Caede dan Car Wash Cinere Depok Jawa Barat. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*. Vol 8(2).
- Ratna, D., & Kismartini. (2018). Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan Di Kota Semarang (Implementasi Perda Jawa Tengah No. 11 Tahun 2014 Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas). *Journal Of Public Policy And Management Review*. Vol 7(2).
- WHO. (2011). World Report On Disability. Who Library Cataloguing In Publication Data.